

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2021 – 2026

VISI

Visi pembangunan Kabupaten Purbalingga tahun 2021 - 2026 merupakan implementasi dari visi Visi Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga periode Tahun 2021-2026 yaitu:

”PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING, MENUJU
MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA”

MISI

1. Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat;
2. Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadiran Allah SWT / Tuhan YME, serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan terciptanya rasa aman dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok masyarakat utamanya pangan dan papan secara layak;
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat;
5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat dengan mendorong simpul - simpul perekonomian utamanya dalam industri pengolahan dan manufaktur, pertanian, perdagangan, jasa, pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja;
6. Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa;
7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah / Infrastruktur dengan tetap memperhatikan Kelestarian Lingkungan.

MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
Misi 1 : Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat		
Tujuan : Meningkatkan tata kelola pemerintahan baik dan kualitas pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengetahui tingkat implementasi Reformasi Birokrasi Kabupaten Purbalingga • Formulasi Pengukuran: $I_1 \quad R = \frac{C}{B} \frac{K}{A} \times 100\%$ • Tipe Penghitungan : Non Kumulatif • Perangda Penanggungjawab: Bappelitbangda, • Sumber Data : LHE RB Kemenpan dan RB
Sasaran :Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah	Nilai SAKIP	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengetahui tingkat implementasi SAKIP Kabupaten Purbalingga • Formulasi Pengukuran: $\frac{N}{C} \frac{E_1}{B} \frac{A}{K} = \times 100\%$ • Tipe Penghitungan : Non Kumulatif • Sumber Data : LHE RB Kemenpan dan RB

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021 - 2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021 – 2026

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	DINAS KESEHATAN
URUSAN PEMERINTAH YANG DILAKSANAKAN	:	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
TUGAS	:	<p>DINKES mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah meliputi :</p> <p>a. Sub Urusan Upaya Kesehatan yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none">1. pengelolaan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan rujukan tingkat daerah;2. pengelolaan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan rujukan tingkat daerah;3. penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas kesehatan tingkat daerah. <p>b. Sub Urusan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none">1. penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan ;2. perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP daerah. <p>c. Sub Urusan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none">1. penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal;2. penerbitan izin usaha mikro obat tradisional (UMOT);3. penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan PKRT kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga;

4. penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga;
5. pengawasan post-market produk makanan-minuman industri rumah tangga.

d. Sub Urusan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan yaitu pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat daerah.

Selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DINKES juga membantu Bupati melaksanakan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

FUNGSI

: DINKES mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan bidang Kesehatan meliputi Pelayanan dan Sumber daya Kesehatan, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kesehatan Masyarakat;
2. pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang Kesehatan meliputi Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kesehatan Masyarakat;
3. pelaksanaan kebijakan bidang Kesehatan meliputi Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kesehatan Masyarakat ;
4. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Kesehatan meliputi Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kesehatan Masyarakat ;
5. pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas;
6. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
7. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
Tujuan 1 :		
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Menggambarkan tingkat dan kualitas derajat kesehatan pada suatu wilayah. • Formulasi Pengukuran: Dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (Age Specific Death Rate/ASDR). • Tipe Penghitungan : Non Kumulatif • Perangda Penanggungjawab: Dinas Kesehatan, BPS, Bappelitbangda • Sumber Data : UHH mengikuti rilis Badan Pusat Statistik (BPS), data diperoleh dari catatan registrasi kematian bertahun-tahun, dan data Sensus Penduduk dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS).
Sasaran 1 :		
Meningkatkan kualitas kelembagaan Dinkes	Nilai SAKIP DINKES	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengetahui tingkat implementasi SAKIP Dinas Kesehatan • Formulasi Pengukuran: $= \frac{C}{B} \times 100\%$ • Tipe Penghitungan : Kumulatif • Perangda Penanggungjawab: Dinas Kesehatan • Sumber Data : LHE SAKIP Inspektorat Daerah Kab. Purbalingga
Sasaran 2 :		
Menurunnya angka morbiditas dan mortalitas	Angka Kematian Ibu	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan program pelayanan kesehatan ibu yang sedang dilaksanakan, dapat memberikan pengaruh pada peningkatan status kesehatan ibu (maternal) terutama ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas, karena mengingat setiap kehamilan itu beresiko dan pembangunan kesehatan di Kabupaten Purbalingga prioritasnya diarahkan pada peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita.

MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
		<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jml Kematian ibu dlm satu tahun}}{\text{Jml Kelahiran Hidup dlm satu tahun}} \times 100.000$ • Tipe Penghitungan : Non Kumulatif • Perangda Penanggungjawab: Dinas Kesehatan • Sumber Data : Puskesmas, Rumah Sakit
	Angka Kematian Bayi	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan program pelayanan kesehatan bayi yang sedang dilaksanakan memberikan pengaruh pada peningkatan kesehatan bayi yang merupakan usia rentan terhadap permasalahan kesehatan, mengingat pembangunan kesehatan di Kabupaten Purbalingga prioritasnya diarahkan pada peningkatan kesehatan ibu, bayi, balita & KB. • Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jml Kematian Bayi dlm satu tahun}}{\text{Jml Kelahiran Hidup dlm satu tahun}} \times 1.000$ • Tipe Penghitungan : Non Kumulatif • Perangda Penanggungjawab: Dinas Kesehatan • Sumber Data : Puskesmas, Rumah Sakit
	Angka Kematian Balita	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan program pelayanan kesehatan balita yang sedang dilaksanakan memberikan pengaruh pada peningkatan kesehatan balita yang merupakan usia rentan terhadap permasalahan kesehatan, mengingat pembangunan kesehatan di Kabupaten Purbalingga prioritasnya diarahkan pada peningkatan kesehatan ibu, bayi, balita & KB. • Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jml Kematian Balita dlm satu tahun}}{\text{Jml Kelahiran Hidup dlm satu tahun}} \times 1.000$ • Tipe Penghitungan : Non Kumulatif • Perangda Penanggungjawab: Dinas Kesehatan

MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
	Indeks Keluarga Sehat	<ul style="list-style-type: none"> • Sumber Data : Puskesmas, Rumah Sakit • Alasan Pemilihan Indikator : Menggambarkan tingkat status sehat dalam sebuah keluarga yaitu keluarga yang setiap individunya berada dalam kondisi yang sejahtera, baik dari segi dari fisik maupun mental, sehingga dapat hidup normal secara sosial dan ekonomi di tengah masyarakat lainnya, yang diukur dengan 12 indikator. • Formulasi Pengukuran: (Jumlah 'Y') /12 - Jumlah N • Tipe Penghitungan : Non Kumulatif • Perangda Penanggungjawab : Dinas Kesehatan • Sumber Data : Puskesmas, Rumah Sakit

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Purbalingga



dr. JUSI FEBRIANTO, MPH
NIP. 19700219 200212 1 004